



**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penerimaan Dana Transfer Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011) yang belum ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dan Penyesuaian Anggaran pada Belanja Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah & Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dimaksud, mengingat rentang waktu proses administrasi keuangan dan pelaksanaan kegiatannya yang mendesak dan panjang sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai atau tidak terealisasi atau stagnasi pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dianggap perlu melakukan perubahan Kedua Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. bahwa perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah penambahan anggaran Pendapatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, penambahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Belanja Hibah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Anggaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja RSUD Andi Djemma Masamba dan Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.
 2. Surat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 503/AS/DPKD/V/2011 perihal Permohonan Pergeseran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan SIMDA.
 3. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara perihal Permohonan Pergeseran Belanja Makan dan Minum Harian Petugas Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni huruf C angka 1 sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari

NO.	URAIAN	ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1.	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 555.160.561.549,00	Rp. 581.074.405.549,00	Rp. 25.913.844.000,00
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 35.011.986.473,00	Rp. 35.011.986.473,00	Rp. -
1.	Pajak Daerah	Rp. 4.251.588.346,00	Rp. 4.251.588.346,00	Rp. -
2.	Retribusi Daerah	Rp. 24.534.717.500,00	Rp. 24.534.717.500,00	Rp. -
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp. 865.784.952,00	Rp. 865.784.952,00	Rp. -
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 5.359.895.675,00	Rp. 5.359.895.675,00	Rp. -
b.	Dana Perimbangan	Rp. 469.983.374.476,00	Rp. 469.983.374.476,00	Rp. -
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 36.407.884.476,00	Rp. 36.407.884.476,00	Rp. -
2.	Dana Alokasi Umum	Rp. 377.853.290.000,00	Rp. 377.853.290.000,00	Rp. -
3.	Dana Alokasi Khusus	Rp. 55.722.200.000,00	Rp. 55.722.200.000,00	Rp. -
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 50.165.200.600,00	Rp. 76.079.044.600,00	Rp. 25.913.844.000,00
1.	H i b a h	Rp. 1.511.650.000,00	Rp. 27.425.494.000,00	Rp. 25.913.844.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 9.973.240.000,00	Rp. 9.973.240.000,00	Rp. -
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 25.913.843.200,00	Rp. 25.913.843.200,00	Rp. -
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 12.065.967.400,00	Rp. 12.065.967.400,00	Rp. -
5.	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 700.500.000,00	Rp. 700.500.000,00	Rp. -
2.	BELANJA DAERAH	Rp. 567.360.561.549,00	Rp. 593.274.405.549,00	Rp. 25.913.844.000,00
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 313.046.323.269,00	Rp. 313.132.180.269,00	Rp. 85.857.000,00
1.	Belanja Pegawai	Rp. 279.411.721.800,00	Rp. 279.411.721.800,00	Rp. -
2.	Belanja Subsidi	Rp. 22.500.000,00	Rp. 22.500.000,00	Rp. -
3.	Belanja Hibah	Rp. 4.070.000.000,00	Rp. 4.155.857.000,00	Rp. 85.857.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.072.573.692,00	Rp. 3.072.573.692,00	Rp. -
5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 629.822.000,00	Rp. 629.822.000,00	Rp. -
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 25.173.860.922,00	Rp. 25.173.860.922,00	Rp. -
7.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 665.844.855,00	Rp. 665.844.855,00	Rp. -
b.	Belanja Langsung	Rp. 254.314.238.280,00	Rp. 280.142.225.280,00	Rp. 25.827.987.000,00
1.	Belanja Pegawai	Rp. 9.166.812.400,00	Rp. 14.332.409.800,00	Rp. 5.165.597.400,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 134.249.575.237,00	Rp. 147.911.964.837,00	Rp. 13.662.389.600,00
3.	Belanja Modal	Rp. 110.897.850.643,00	Rp. 117.897.850.643,00	Rp. 7.000.000.000,00
	<i>Defisit.....</i>	<i>Rp. (12.200.000.000,00)</i>	<i>Rp. (12.200.000.000,00)</i>	<i>Rp. -</i>
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 12.200.000.000,00	Rp. 12.200.000.000,00	Rp. -
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 29.146.031.362,00	Rp. 29.146.031.362,00	Rp. -
1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya *)	Rp. 28.846.031.362,00	Rp. 28.846.031.362,00	
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 16.946.031.362,00	Rp. 16.946.031.362,00	Rp. -
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp. -	Rp. -	
2.	Pembayaran Pokok Utang	Rp. -	Rp. -	
3.	Dana Bergulir	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	
4.	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp. 16.646.031.362,00	Rp. 16.646.031.362,00	
	SILPA*) Anggaran Tahun Berkenan...	Rp. -	Rp. -	Rp. -

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Diantara Pasal 3 dan 4 disisipkan 1 (Satu) Pasal, yakni Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan/atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

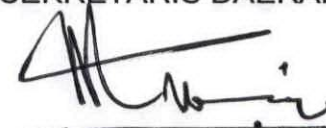
Ditetapkan di Masamba,
Pada tanggal 7 Juni 2011

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Kepala DPKD	
4. Kabid Anggaran	
5. Kasi Penyusunan APBD	

BUPATI, 

ARIFIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,


MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR. 14

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINGKASAN PERUBAHAN II (KEDUA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN				
		ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN II (KEDUA)	BERTAMBAH / BERKURANG		% ANGGARAN
				Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	Rp 555.160.561.549,00	Rp 597.706.405.549,00	Rp 42.545.844.000,00	7,66%	100,00%
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 35.011.986.473,00	Rp 35.011.986.473,00	Rp -	0,00%	5,63%
1. 1 1	Hasil Pajak Daerah	Rp 4.251.588.346,00	Rp 4.251.588.346,00	Rp -	0,00%	0,67%
1. 1 2	Hasil Retribusi Daerah	Rp 24.534.717.500,00	Rp 24.534.717.500,00	Rp -	0,00%	3,45%
1. 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 865.784.952,00	Rp 865.784.952,00	Rp -	0,00%	0,32%
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 5.359.895.675,00	Rp 5.359.895.675,00	Rp -	0,00%	1,20%
1. 2	DANA PERIMBANGAN	Rp 469.983.374.476,00	Rp 469.983.374.476,00	Rp -	0,00%	88,32%
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 36.407.884.476,00	Rp 36.407.884.476,00	Rp -	0,00%	7,42%
1 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 377.853.290.000,00	Rp 377.853.290.000,00	Rp -	0,00%	72,34%
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 55.722.200.000,00	Rp 55.722.200.000,00	Rp -	0,00%	8,56%
1. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 50.165.200.600,00	Rp 92.711.044.600,00	Rp 42.545.844.000,00	84,81%	6,05%
1. 3 1	Pendapatan Hibah	Rp 1.511.650.000,00	Rp 27.425.494.000,00	Rp 25.913.844.000,00	1714,28%	0,33%
1. 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9.973.240.000,00	Rp 9.973.240.000,00	Rp -	0,00%	1,97%
1. 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 25.913.843.200,00	Rp 42.545.843.200,00	Rp 16.632.000.000,00	64,18%	1,33%
3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 12.065.967.400,00	Rp 12.065.967.400,00	Rp -	0,00%	2,25%
3 6	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 700.500.000,00	Rp 700.500.000,00	Rp -	0,00%	0,18%
2	BELANJA	Rp 567.360.561.549,00	Rp 609.906.405.549,00	Rp 42.545.844.000,00	7,50%	100,00%
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 313.046.323.269,00	Rp 313.132.180.269,00	Rp 85.857.000,00	0,03%	51,34%
2 1 1	Belanja Pegawai	Rp 279.411.721.800,00	Rp 279.411.721.800,00	Rp -	0,00%	45,81%
	- Belanja Pegawai Gaji PNS	Rp 218.725.173.000,00	Rp 218.725.173.000,00	Rp -	0,00%	35,86%
	- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS	Rp 49.627.335.000,00	Rp 49.627.335.000,00	Rp -	0,00%	8,14%
	- Belanja Pegawai Lainnya	Rp 11.059.213.800,00	Rp 11.059.213.800,00	Rp -	0,00%	1,81%
2 1 3	Belanja Subsidi	Rp 22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp -	0,00%	5,96%
2 1 4	Belanja Hibah	Rp 4.070.000.000,00	Rp 4.155.857.000,00	Rp 85.857.000,00	2,11%	5,96%
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.072.573.692,00	Rp 3.072.573.692,00	Rp -	0,00%	0,64%
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 629.822.000,00	Rp 629.822.000,00	Rp -	0,00%	0,09%
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 25.173.860.922,00	Rp 25.173.860.922,00	Rp -	0,00%	3,99%
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	Rp 665.844.855,00	Rp 665.844.855,00	Rp -	0,00%	0,13%
2 2	BELANJA LANGSUNG	Rp 254.314.238.280,00	Rp 296.774.225.280,00	Rp 42.459.987.000,00	16,70%	48,66%
2 2 1	Belanja Pegawai	Rp 9.166.812.400,00	Rp 14.332.409.800,00	Rp 5.165.597.400,00	56,35%	0,00%
2 2 2	Belanja Barang dan jasa	Rp 134.249.575.237,00	Rp 147.911.964.837,00	Rp 13.662.389.600,00	10,18%	0,00%
2 2 3	Belanja Modal	Rp 110.897.850.643,00	Rp 134.529.850.643,00	Rp 23.632.000.000,00	21,31%	0,00%
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (12.200.000.000,00)	Rp (12.200.000.000,00)	Rp -	0,00%	100,00%
	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 12.200.000.000,00	Rp 12.200.000.000,00	Rp -	0,00%	100,00%
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 29.146.031.362,00	Rp 29.146.031.362,00	Rp -	0,00%	82,30%
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 28.846.031.362,00	Rp 28.846.031.362,00	Rp -	0,00%	81,27%
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	0,00%	1,03%
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 16.946.031.362,00	Rp 16.946.031.362,00	Rp -	0,00%	100,00%
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	38,48%
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%
3 2 5	Pinjaman Dana Bergulir	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	0,00%	61,52%
3 2 6	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp 16.646.031.362,00	Rp 16.646.031.362,00	Rp -	0,00%	61,52%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp -	Rp -	Rp -		

BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Kepala DPKD	
4. Kabid Anggaran	
5. Kasi Penyusunan APBD	

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 RINGKASAN PERUBAHAN I (KEDUA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2011

PERUBAHAN ANGGARAN DARI PERUBAHAN I (KESATU) KE PERUBAHAN II (KEDUA)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN				
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG		% ANGGARAN
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	Rp 581.074.405.549,00	Rp 597.706.405.549,00	Rp 16.632.000.000,00	2,86%	100,00%
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 35.011.986.473,00	Rp 35.011.986.473,00	Rp -	0,00%	5,63%
1. 1 1	Hasil Pajak Daerah	Rp 4.251.588.346,00	Rp 4.251.588.346,00	Rp -	0,00%	0,67%
1. 1 2	Hasil Retribusi Daerah	Rp 24.534.717.500,00	Rp 24.534.717.500,00	Rp -	0,00%	3,45%
1. 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 865.784.952,00	Rp 865.784.952,00	Rp -	0,00%	0,32%
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 5.359.895.675,00	Rp 5.359.895.675,00	Rp -	0,00%	1,20%
1. 2	DANA PERIMBANGAN	Rp 469.983.374.476,00	Rp 469.983.374.476,00	Rp -	0,00%	88,32%
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 36.407.884.476,00	Rp 36.407.884.476,00	Rp -	0,00%	7,42%
1 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 377.853.290.000,00	Rp 377.853.290.000,00	Rp -	0,00%	72,34%
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 55.722.200.000,00	Rp 55.722.200.000,00	Rp -	0,00%	8,56%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 76.079.044.600,00	Rp 92.711.044.600,00	Rp 16.632.000.000,00	21,86%	6,05%
3 1	Pendapatan Hibah	Rp 27.425.494.000,00	Rp 27.425.494.000,00	Rp -	0,00%	0,33%
1. 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9.973.240.000,00	Rp 9.973.240.000,00	Rp -	0,00%	1,97%
1. 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 25.913.843.200,00	Rp 42.545.843.200,00	Rp 16.632.000.000,00	64,18%	1,33%
1. 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 12.065.967.400,00	Rp 12.065.967.400,00	Rp -	0,00%	2,25%
1. 3 6	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 700.500.000,00	Rp 700.500.000,00	Rp -	0,00%	0,18%
2	BELANJA	Rp 593.274.405.549,00	Rp 609.906.405.549,00	Rp 16.632.000.000,00	2,80%	100,00%
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 313.132.180.269,00	Rp 313.132.180.269,00	Rp -	0,00%	51,34%
2 1 1	Belanja Pegawai	Rp 279.411.721.800,00	Rp 279.411.721.800,00	Rp -	0,00%	45,81%
	- Belanja Pegawai Gaji PNS	Rp 218.725.173.000,00	Rp 218.725.173.000,00	Rp -	0,00%	35,86%
	- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS	Rp 49.627.335.000,00	Rp 49.627.335.000,00	Rp -	0,00%	8,14%
	- Belanja Pegawai Lainnya	Rp 11.059.213.800,00	Rp 11.059.213.800,00	Rp -	0,00%	1,81%
2 1 3	Belanja Subsidi	Rp 22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp -	0,00%	5,96%
2 1 4	Belanja Hibah	Rp 4.155.857.000,00	Rp 4.155.857.000,00	Rp -	0,00%	5,96%
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.072.573.692,00	Rp 3.072.573.692,00	Rp -	0,00%	0,64%
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 629.822.000,00	Rp 629.822.000,00	Rp -	0,00%	0,09%
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 25.173.860.922,00	Rp 25.173.860.922,00	Rp -	0,00%	3,99%
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	Rp 665.844.855,00	Rp 665.844.855,00	Rp -	0,00%	0,13%
2 2	BELANJA LANGSUNG	Rp 280.142.225.280,00	Rp 296.774.225.280,00	Rp 16.632.000.000,00	5,94%	48,66%
2 2 1	Belanja Pegawai	Rp 14.332.409.800,00	Rp 14.332.409.800,00	Rp -	0,00%	0,00%
2 2 2	Belanja Barang dan jasa	Rp 147.911.964.837,00	Rp 147.911.964.837,00	Rp -	0,00%	0,00%
2 2 3	Belanja Modal	Rp 117.897.850.643,00	Rp 134.529.850.643,00	Rp 16.632.000.000,00	14,11%	0,00%
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (12.200.000.000,00)	Rp (12.200.000.000,00)	Rp -	0,00%	100,00%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 12.200.000.000,00	Rp 12.200.000.000,00	Rp -	0,00%	100,00%
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 29.146.031.362,00	Rp 29.146.031.362,00	Rp -	0,00%	82,30%
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 28.846.031.362,00	Rp 28.846.031.362,00	Rp -	0,00%	81,27%
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	0,00%	1,03%
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 16.946.031.362,00	Rp 16.946.031.362,00	Rp -	0,00%	100,00%
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	38,48%
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!	0,00%
3 2 5	Pinjaman Dana Bergulir	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	0,00%	61,52%
3 2 6	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp 16.646.031.362,00	Rp 16.646.031.362,00	Rp -	0,00%	61,52%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Kepala DPKD	
4. Kabid Anggaran	
5. Kasi Penyusunan APBD	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 PENJABARAN PERUBAHAN II (KEDUA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6		
1.01.101.01.	DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA & PEMUDA						
4.	PENDAPATAN	Rp	Rp	Rp	Rp		
6.	BELANJA	Rp 214.998.420.000,00	Rp 214.998.420.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 140.983.678.000,00	Rp 140.983.678.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 140.983.678.000,00	Rp 140.983.678.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 119.248.723.000,00	Rp 119.248.723.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 21.735.655.000,00	Rp 21.735.655.000,00	Rp	Rp		
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 74.014.742.000,00	Rp 74.014.742.000,00	Rp	Rp		
1.02.102.01.	DINAS KESEHATAN	Rp (214.998.420.000,00)	Rp (214.998.420.000,00)	Rp	Rp		
4.	PENDAPATAN	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.300.000.000,00	Rp	Rp		
5.	BELANJA	Rp 40.403.021.994,00	Rp 40.403.021.994,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 24.177.285.000,00	Rp 24.177.285.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 24.177.285.000,00	Rp 24.177.285.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 18.937.965.000,00	Rp 18.937.965.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 5.174.400.000,00	Rp 5.174.400.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Peningkatan Retribusi Daerah	Rp 65.000.000,00	Rp 65.000.000,00	Rp	Rp		
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 16.225.756.994,00	Rp 16.225.756.994,00	Rp	Rp		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (39.103.021.994,00)	Rp (39.103.021.994,00)	Rp	Rp		
1.02.102.02.	RUMAH SAKIT UNJUM ANDI DJENMA MASAMBA						
4.	PENDAPATAN	Rp 19.976.160.000,00	Rp 19.976.160.000,00	Rp	Rp		
5.	BELANJA	Rp 43.068.813.000,00	Rp 52.968.813.000,00	Rp 9.900.000.000,00	Rp		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 14.083.548.000,00	Rp 14.083.548.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 14.083.548.000,00	Rp 14.083.548.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 10.227.523.000,00	Rp 10.227.523.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 3.431.800.000,00	Rp 3.431.800.000,00	Rp	Rp		
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Peningkatan Retribusi Daerah	Rp 424.225.000,00	Rp 424.225.000,00	Rp	Rp		
xx.xx.5.2.	Belanja Langsung	Rp 28.983.265.000,00	Rp 38.983.265.000,00	Rp 9.900.000.000,00	Rp		
xx.xx.5.2.	Program Lainnya	Rp 20.111.465.400,00	Rp 20.111.465.400,00	Rp	Rp		
28.	6.2.	Rp 8.871.799.600,00	Rp 18.771.799.600,00	Rp 9.900.000.000,00	Rp		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG			
		3	4	Rp.		6	
1	2						
	Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Parus Mata						
20.18.6.2.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Rp -	Rp 2.038.000.000,00	Rp 2.038.000.000,00	Rp 2.038.000.000,00		
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp -	Rp 2.038.000.000,00	Rp 2.038.000.000,00	Rp 2.038.000.000,00		
5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengolahan Limbah	Rp -	Rp 2.038.000.000,00	Rp 2.038.000.000,00	Rp 2.038.000.000,00		
	1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Rp -	Rp 2.038.000.000,00	Rp 2.038.000.000,00	Rp 2.038.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Kesehatan Tahun 2011	
28.18.6.2.	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Rp 2.032.000.000,00	Rp 8.898.000.000,00	Rp 7.864.000.000,00	Rp 7.864.000.000,00		
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	Rp 2.032.000.000,00	Rp 8.898.000.000,00	Rp 7.864.000.000,00	Rp 7.864.000.000,00		
5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Umum	Rp 2.032.000.000,00	Rp 8.898.000.000,00	Rp 7.864.000.000,00	Rp 7.864.000.000,00		
	1. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Umum (DAPU)	Rp 2.032.000.000,00	Rp 2.032.000.000,00	Rp -	Rp -		
	2. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Umum (DPRD)	Rp -	Rp 7.864.000.000,00	Rp 7.864.000.000,00	Rp 7.864.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Kesehatan Tahun 2011	
24.xx.6.2.18.xx	Kegiatan Lainnya	Rp 6.839.789.800,00	Rp 6.839.789.800,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (23.090.663.000,00)	Rp (32.990.663.000,00)	Rp (9.900.000.000,00)	Rp (9.900.000.000,00)		
1.03.1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM						
4.	PENDAPATAN	Rp 928.893.883,00	Rp 928.893.883,00	Rp -	Rp -		
5.	BELANJA	Rp 89.869.088.288,00	Rp 66.891.008.288,00	Rp 6.732.000.000,00	Rp 6.732.000.000,00		
00.00.6.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 5.179.640.000,00	Rp 5.179.640.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.6.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 5.179.640.000,00	Rp 5.179.640.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 4.307.240.000,00	Rp 4.307.240.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PUS	Rp 842.400.000,00	Rp 842.400.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Penunjang Rehabilitasi Daerah	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -		
xx.xx.6.2.	Belanja Langsung	Rp 54.779.368.288,00	Rp 61.511.368.288,00	Rp 6.732.000.000,00	Rp 6.732.000.000,00		
xx.xx.6.2.	Program Lainnya	Rp 50.889.688.288,00	Rp 50.889.688.288,00	Rp -	Rp -		
02.5.2.	Program Peringkasan Sarana & Prasarana Aparatur	Rp 3.303.600.000,00	Rp 6.086.600.000,00	Rp 1.782.000.000,00	Rp 1.782.000.000,00		
02.01.6.2.	Pembangunan Rumah Jabatan	Rp -	Rp 126.000.000,00	Rp 126.000.000,00	Rp 126.000.000,00		
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp -	Rp 126.000.000,00	Rp 126.000.000,00	Rp 126.000.000,00		
5.2.3.26.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan	Rp -	Rp 126.000.000,00	Rp 126.000.000,00	Rp 126.000.000,00		
	1. Pembangunan Pagar Belahang Rajah Bupati Lama	Rp -	Rp 126.000.000,00	Rp 126.000.000,00	Rp 126.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
02.02.6.2.	Pembangunan Rumah Dinas	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		
5.2.3.26.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		
	1. Pembangunan Mess Pemda Kecamatan Rampi	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
02.03.6.2.	Pembangunan Gedung Kantor	Rp -	Rp 1.452.000.000,00	Rp 1.452.000.000,00	Rp 1.452.000.000,00		
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp -	Rp 1.452.000.000,00	Rp 1.452.000.000,00	Rp 1.452.000.000,00		
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kantor	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
	1. Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Hapgedecang	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
	2. Pembangunan Kantor Kelurahan Kopyuna	Rp -	Rp 700.000.000,00	Rp 700.000.000,00	Rp 700.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
	3. Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Blisse	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
	4. Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Bone-Bone	Rp -	Rp 99.000.000,00	Rp 99.000.000,00	Rp 99.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	P E N U J E L A S A N
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA			
1	2	3	4	5	6	
5. Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Baebunta		Rp -	Rp 96.000.000,00	Rp 96.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
6. Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Sabbing		Rp -	Rp 95.000.000,00	Rp 95.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
7. Penataan Ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum		Rp -	Rp 65.800.000,00	Rp 65.800.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
8. Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Malahyke		Rp -	Rp 98.600.000,00	Rp 98.600.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
8. Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Masamba		Rp -	Rp 98.600.000,00	Rp 98.600.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
02.41.5.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Rp -	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00		
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp -	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00		
5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	Rp -	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
02.42.6.2	1. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Malahyke	Rp -	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00		
5.2.3.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		
1. Rehabilitasi Kantor UPT Transmigrasi Pongkase Desa Lampungawa		Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Tahun 2011	
02.xx.5.2.xx.xx	Kegiatan Lainnya	Rp 3.303.600.000,00	Rp 3.303.600.000,00	Rp -		
24.6.2	Program Pengembangan dan pengelolakan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pemeliharaan Lainnya	Rp 686.200.000,00	Rp 6.536.200.000,00	Rp 4.850.000.000,00		
24.01.6.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rp -	Rp 4.950.000.000,00	Rp 4.950.000.000,00		
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Jaringan Air	Rp -	Rp 4.950.000.000,00	Rp 4.950.000.000,00		
5.2.3.23.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kantor	Rp -	Rp 4.950.000.000,00	Rp 4.950.000.000,00		
1. Rehabilitasi Bendung di Kunt-Kunt Kasambi Kecamatan Masamba		Rp -	Rp 4.950.000.000,00	Rp 4.950.000.000,00	Sumber Dana : DPID Bidang Irigasi Tahun 2011	
24.xx.5.2.19.xx	Kegiatan Lainnya	Rp 686.200.000,00	Rp 686.200.000,00	Rp -		
		Rp (59.030.744.603,00)	Rp (65.762.744.603,00)	Rp (6.732.000.000,00)		
1.06.1.06.01	BIDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
4	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -		
5	BELANJA	Rp 6.719.594.000,00	Rp 6.719.594.000,00	Rp -		
00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.219.494.000,00	Rp 2.219.494.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 2.219.494.000,00	Rp 2.219.494.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 1.787.894.000,00	Rp 1.787.894.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 431.600.000,00	Rp 431.600.000,00	Rp -		
xx.xx.5.2	Belanja Langsung	Rp 4.500.100.000,00	Rp 4.500.100.000,00	Rp -		
		Rp (6.719.594.000,00)	Rp (6.719.594.000,00)	Rp -		
1.07.1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN					
4	PENDAPATAN	Rp 226.000.000,00	Rp 226.000.000,00	Rp -		
5	BELANJA	Rp 4.530.135.000,00	Rp 4.530.135.000,00	Rp -		
00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.599.065.000,00	Rp 2.599.065.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 2.689.065.000,00	Rp 2.689.065.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.01	Gaji & Tunjangan	Rp 1.970.215.000,00	Rp 1.970.215.000,00	Rp -		
00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 617.600.000,00	Rp 617.600.000,00	Rp -		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG			
		3	4	5		6	
1	2	3	4	5		6	
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 11.250.000,00	Rp 11.250.000,00	Rp -	Rp -		
xx.00.5.2.	Belanja Langsung	Rp 1.931.070.000,00	Rp 1.931.070.000,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (4.305.135.000,00)	Rp (4.305.135.000,00)	Rp -	Rp -		
1.08.108.01.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP						
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5.	BELANJA	Rp 2.306.848.000,00	Rp 2.306.848.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 660.698.000,00	Rp 660.698.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 660.698.000,00	Rp 660.698.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 529.798.000,00	Rp 529.798.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 130.800.000,00	Rp 130.800.000,00	Rp -	Rp -		
xx.00.5.2.	Belanja Langsung	Rp 1.646.250.000,00	Rp 1.646.250.000,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (2.306.848.000,00)	Rp (2.306.848.000,00)	Rp -	Rp -		
1.10.110.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
4.	PENDAPATAN	Rp 406.030.000,00	Rp 406.030.000,00	Rp -	Rp -		
5.	BELANJA	Rp 4.116.026.000,00	Rp 4.116.026.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.029.195.000,00	Rp 2.029.195.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 2.029.195.000,00	Rp 2.029.195.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.491.693.000,00	Rp 1.491.693.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 517.200.000,00	Rp 517.200.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 20.302.000,00	Rp 20.302.000,00	Rp -	Rp -		
xx.00.5.2.	Belanja Langsung	Rp 2.086.830.000,00	Rp 2.086.830.000,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (3.709.995.000,00)	Rp (3.709.995.000,00)	Rp -	Rp -		
1.11.111.01.	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN						
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5.	BELANJA	Rp 5.716.633.000,00	Rp 5.716.633.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.464.471.000,00	Rp 3.464.471.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 3.464.471.000,00	Rp 3.464.471.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 2.670.071.000,00	Rp 2.670.071.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 794.400.000,00	Rp 794.400.000,00	Rp -	Rp -		
xx.00.5.2.	Belanja Langsung	Rp 2.252.162.000,00	Rp 2.252.162.000,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (6.716.633.000,00)	Rp (6.716.633.000,00)	Rp -	Rp -		
1.13.113.01.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5.	BELANJA	Rp 6.336.625.000,00	Rp 6.336.625.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.531.255.000,00	Rp 3.531.255.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 3.531.255.000,00	Rp 3.531.255.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.01.	Gaji & Tunjangan	Rp 2.957.055.000,00	Rp 2.957.055.000,00	Rp -	Rp -		
00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 674.200.000,00	Rp 674.200.000,00	Rp -	Rp -		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011				BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	3	4		
1	2	3	4	5	6	8	
xx. xx. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 2.805.270.000,00	Rp 2.805.270.000,00	Rp -	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (8.336.535.000,00)	Rp (8.336.535.000,00)	Rp -	-		
1. 14. 1.14.01.	KANTOR LATHIHAN KERJA						
	PENDAPATAN	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -	-		
	BELANJA	Rp 2.441.490.000,00	Rp 2.441.490.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.028.590.000,00	Rp 1.028.590.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 1.028.590.000,00	Rp 1.028.590.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 871.190.000,00	Rp 871.190.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 154.800.000,00	Rp 154.800.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemulihan Rehabilitasi Daerah	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Rp -	-		
xx. xx. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 1.414.000.000,00	Rp 1.414.000.000,00	Rp -	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (2.429.490.000,00)	Rp (2.429.490.000,00)	Rp -	-		
1. 15 1.15.01.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-		
	BELANJA	Rp 3.976.030.000,00	Rp 3.976.030.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.235.335.000,00	Rp 2.235.335.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 2.235.335.000,00	Rp 2.235.335.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.767.535.000,00	Rp 1.767.535.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 467.800.000,00	Rp 467.800.000,00	Rp -	-		
xx. xx. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 1.739.695.000,00	Rp 1.739.695.000,00	Rp -	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (3.976.030.000,00)	Rp (3.976.030.000,00)	Rp -	-		
1. 19.01.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-		
	BELANJA	Rp 2.618.381.000,00	Rp 2.618.381.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.477.611.000,00	Rp 1.477.611.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 1.477.611.000,00	Rp 1.477.611.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.148.911.000,00	Rp 1.148.911.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 328.800.000,00	Rp 328.800.000,00	Rp -	-		
xx. xx. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 1.140.750.000,00	Rp 1.140.750.000,00	Rp -	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (2.618.381.000,00)	Rp (2.618.381.000,00)	Rp -	-		
1. 20. 1.20.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (POS DPRD)						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-		
	BELANJA	Rp 6.054.656.800,00	Rp 6.054.656.800,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 5.054.556.800,00	Rp 5.054.556.800,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 6.054.656.800,00	Rp 6.054.656.800,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 3.290.556.800,00	Rp 3.290.556.800,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 03.	Belanja Pemeliharaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KOWHMDH	Rp 1.764.000.000,00	Rp 1.764.000.000,00	Rp -	-		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	6	
xx, xx, 5, 2.	Belanja Langsung	Rp	Rp	Rp	Rp		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (5.054.558.800,00)	Rp (5.054.558.800,00)	Rp	-		
1. 20. 1.20.02.	KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH						
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp	Rp	Rp	Rp		
	PENDAPATAN	-	-	-	-		
	BELANJA	488.400.000,00	488.400.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp	Rp	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	488.400.000,00	488.400.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	168.400.000,00	168.400.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1. 03.	Belanja Penemuan Lainnya Peminjaman & Anggapan DPRD serta KDH/KY/DH	300.000.000,00	300.000.000,00	Rp	-		
xx, xx, 5, 2.	Belanja Langsung	Rp	Rp	Rp	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (488.400.000,00)	Rp (488.400.000,00)	Rp	-		
1. 20. 1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH						
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp	Rp	Rp	Rp		
	PENDAPATAN	300.000.000,00	300.000.000,00	Rp	-		
	BELANJA	24.144.005.000,00	24.144.005.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp	Rp	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	8.601.950.000,00	8.601.950.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	6.890.350.000,00	6.890.350.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.611.600.000,00	1.611.600.000,00	Rp	-		
xx, xx, 5, 2.	Belanja Langsung	15.642.055.000,00	15.642.055.000,00	Rp	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (23.844.005.000,00)	Rp (23.844.005.000,00)	Rp	-		
1. 20.04.	SEKRETARIAT DEWAN PERMAKULAN RAKYAT DAERAH						
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp	Rp	Rp	Rp		
	PENDAPATAN	-	-	-	-		
	BELANJA	13.387.238.000,00	13.387.238.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp	Rp	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	2.311.376.000,00	2.311.376.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	1.963.378.000,00	1.963.378.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	348.000.000,00	348.000.000,00	Rp	-		
xx, xx, 5, 2.	Belanja Langsung	11.075.860.000,00	11.075.860.000,00	Rp	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (13.387.238.000,00)	Rp (13.387.238.000,00)	Rp	-		
1. 20. 1.20.05.	INSPEKTORAT KABUPATEN						
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp	Rp	Rp	Rp		
	PENDAPATAN	-	-	-	-		
	BELANJA	4.223.878.000,00	4.223.878.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp	Rp	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	1.985.528.000,00	1.985.528.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	1.502.728.000,00	1.502.728.000,00	Rp	-		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	482.800.000,00	482.800.000,00	Rp	-		
xx, xx, 5, 2.	Belanja Langsung	2.238.350.000,00	2.238.350.000,00	Rp	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (4.223.878.000,00)	Rp (4.223.878.000,00)	Rp	-		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH/ BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	
1. 20. 1.20.06.	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
4.	PENDAPATAN	Rp 668.039.604.365,00	Rp 672.731.004.388,00	Rp 16.632.000.000,00			
00. 00. 4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 10.037.165.200,00	Rp 10.037.165.200,00	Rp -			
00. 00. 4. 2.	Dana Perimbangan	Rp 468.093.374.476,00	Rp 468.093.374.476,00	Rp -			
00. 00. 4. 3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 76.079.044.690,00	Rp 92.771.044.690,00	Rp 16.632.000.000,00			
00. 00. 4. 3. 1.	Pendapatan Hibah	Rp 27.425.494.000,00	Rp 27.425.494.000,00	Rp -			
00. 00. 4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9.973.240.000,00	Rp 9.973.240.000,00	Rp -			
00. 00. 4. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 28.913.843.200,00	Rp 42.645.843.200,00	Rp 16.632.000.000,00			
00. 00. 4. 3. 4. 01.	Dana Penyesuaian	Rp 25.913.843.200,00	Rp 25.913.843.200,00	Rp -			
00. 00. 4. 3. 4. 02.	Dana Desentralisasi Fisikal	Rp -	Rp 16.632.000.000,00	Rp 16.632.000.000,00			
00. 00. 4. 3. 4. 02. 01.	Dana Desentralisasi Fisikal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2011	Rp -	Rp 16.632.000.000,00	Rp 16.632.000.000,00			
	- Bidang Kesehatan	Rp -	Rp 8.900.000.000,00	Rp 8.900.000.000,00			
	- Bidang Bidang Infrastruktur Hiliris	Rp -	Rp 4.950.000.000,00	Rp 4.950.000.000,00			
	- Bidang Prasarana Pemda	Rp -	Rp 1.782.000.000,00	Rp 1.782.000.000,00			
00. 00. 4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 12.065.987.400,00	Rp 12.065.987.400,00	Rp -			
00. 00. 4. 3. 6.	Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	Rp 700.500.000,00	Rp 700.500.000,00	Rp -			
6.	BELANJA	Rp 67.061.219.469,00	Rp 67.061.219.469,00	Rp -			
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 49.482.269.469,00	Rp 49.482.269.469,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 16.761.811.000,00	Rp 16.761.811.000,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 10.935.972.000,00	Rp 10.935.972.000,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 3.331.800.000,00	Rp 3.331.800.000,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 1. 04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Rp 1.480.000.000,00	Rp 1.480.000.000,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 3.939.000,00	Rp 3.939.000,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 3.	Belanja Subsidi	Rp 22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 4.	Belanja Hibah	Rp 4.156.867.000,00	Rp 4.156.867.000,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.072.573.692,00	Rp 3.072.573.692,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp 629.922.000,00	Rp 629.922.000,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	Rp 26.173.860.922,00	Rp 26.173.860.922,00	Rp -			
00. 00. 5. 1. 8.	Belanja Tak Terduga	Rp 686.844.856,00	Rp 686.844.856,00	Rp -			
XX. XX. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 17.578.850.000,00	Rp 17.578.850.000,00	Rp -			
XX. XX. 5. 2.	Program Lainnya	Rp 14.020.464.000,00	Rp 14.020.464.000,00	Rp -			
17. 5. 2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 3.658.486.000,00	Rp 3.658.486.000,00	Rp -			
17. 21. 5. 2.	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Rp 269.850.000,00	Rp 269.850.000,00	Rp -			
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 243.850.000,00	Rp 243.850.000,00	Rp -			
5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	Rp 57.100.000,00	Rp 57.100.000,00	Rp -			
5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp -			

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011

Rp 8.732.000.000,000

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011				BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA				
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
5. 2. 2. 01. 03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rp 48.600.000,00	Rp 48.600.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 06. 02	Belanja Penggandaan	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 11.	Belanja Makan dan Minum	Rp 6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp 6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 65.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp (50.000.000,00)			
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 65.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp (50.000.000,00)			
5. 2. 2. 20.	Belanja Pemeliharaan	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 20. 20.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 20. 36.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 22.	Belanja Transportasi	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00			
5. 2. 2. 22. 01.	Belanja Transportasi	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00			
5. 2. 2. 24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Rp 84.000.000,00	Rp 84.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 2. 24. 01.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Rp 84.000.000,00	Rp 84.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 3.	Belanja Modal	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp -	-		
5. 2. 3. 12. 01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/server	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp -	-		
24. xx. 5. 2. 18. xx	Kepribaan Lainnya	Rp 3.289.636.000,00	Rp 3.289.636.000,00	Rp -	-		
1. 20. 1.20.08.	PEMBAYARAN	Rp 489.038.384.897,00	Rp 505.670.384.897,00	Rp 16.632.000.000,00			
1. 20.06. 00. 00. 6. 1.	Penerimaan Pembayaran Daerah	Rp 28.146.031.382,00	Rp 28.146.031.382,00	Rp -	-		
1. 20.06. 00. 00. 6. 2.	Penerimaan Pembayaran Daerah	Rp 18.946.031.382,00	Rp 18.946.031.382,00	Rp -	-		
1. 20. 1.20.07.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT						
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-		
5.	BELANJA	Rp 6.205.222.000,00	Rp 6.205.222.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.097.772.000,00	Rp 2.097.772.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 2.097.772.000,00	Rp 2.097.772.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.663.372.000,00	Rp 1.663.372.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 434.400.000,00	Rp 434.400.000,00	Rp -	-		
xx. xx. 5. 2	Belanja Langsung	Rp 3.107.450.000,00	Rp 3.107.450.000,00	Rp -	-		
1. 20. 1.20.08.	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (6.205.222.000,00)	Rp (5.205.222.000,00)	Rp -	-		
4.	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-		
5.	BELANJA	Rp 3.984.630.000,00	Rp 3.984.630.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.285.580.000,00	Rp 2.285.580.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 2.285.580.000,00	Rp 2.285.580.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.925.580.000,00	Rp 1.925.580.000,00	Rp -	-		
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 360.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Rp -	-		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG			
		3	4	5	6		
1	Belanja Langsung	Rp 1.689.050.000,00	Rp 1.689.050.000,00	Rp -	-		
xx. xx. 5. 2.	Belanja Langsung	Rp 1.689.050.000,00	Rp 1.689.050.000,00	Rp -	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (3.954.630.000,00)	Rp (3.954.630.000,00)	Rp -	-		
1. 20. 1.20.09.	PEMERINTAH KECAMATAN SABBAING						
	PENDAPATAN	Rp 101.435.000,00	Rp 101.435.000,00	Rp -	-		
	4	Rp 101.435.000,00	Rp 101.435.000,00	Rp -	-		
	5	Rp 1.764.710.000,00	Rp 1.764.710.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1.	Rp 1.483.950.000,00	Rp 1.483.950.000,00	Rp -	-		
	Belanja Tidak Langsung						
	00. 00. 6. 1. 1.	Rp 1.463.950.000,00	Rp 1.463.950.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 01.	Rp 1.235.678.000,00	Rp 1.235.678.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 02.	Rp 223.200.000,00	Rp 223.200.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 05.	Rp 5.072.000,00	Rp 5.072.000,00	Rp -	-		
	xx. xx. 5. 2.	Rp 300.760.000,00	Rp 300.760.000,00	Rp -	-		
	Belanja Langsung	Rp 300.760.000,00	Rp 300.760.000,00	Rp -	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.663.275.000,00)	Rp (1.663.275.000,00)	Rp -	-		
1. 20. 1.20.10.	PEMERINTAH KECAMATAN BAEBUNTA						
	PENDAPATAN	Rp 7.514.500,00	Rp 7.514.500,00	Rp -	-		
	4	Rp 7.514.500,00	Rp 7.514.500,00	Rp -	-		
	5	Rp 1.843.599.000,00	Rp 1.843.599.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1.	Rp 1.590.459.000,00	Rp 1.590.459.000,00	Rp -	-		
	Belanja Tidak Langsung						
	00. 00. 6. 1. 1.	Rp 1.590.459.000,00	Rp 1.590.459.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 01.	Rp 1.369.283.000,00	Rp 1.369.283.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 02.	Rp 220.800.000,00	Rp 220.800.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 05.	Rp 376.000,00	Rp 376.000,00	Rp -	-		
	xx. xx. 5. 2.	Rp 253.140.000,00	Rp 253.140.000,00	Rp -	-		
	Belanja Langsung	Rp 253.140.000,00	Rp 253.140.000,00	Rp -	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.838.084.500,00)	Rp (1.838.084.500,00)	Rp -	-		
1. 20. 11.	PEMERINTAH KECAMATAN LIMBONG						
	PENDAPATAN	Rp 1.350.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp -	-		
	4	Rp 1.350.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp -	-		
	5	Rp 948.010.000,00	Rp 948.010.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1.	Rp 744.870.000,00	Rp 744.870.000,00	Rp -	-		
	Belanja Tidak Langsung						
	00. 00. 6. 1. 1.	Rp 744.870.000,00	Rp 744.870.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 01.	Rp 530.002.000,00	Rp 530.002.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 02.	Rp 214.800.000,00	Rp 214.800.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 05.	Rp 68.000,00	Rp 68.000,00	Rp -	-		
	xx. xx. 5. 2.	Rp 203.140.000,00	Rp 203.140.000,00	Rp -	-		
	Belanja Langsung	Rp 203.140.000,00	Rp 203.140.000,00	Rp -	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (946.660.000,00)	Rp (946.660.000,00)	Rp -	-		
1. 20. 1.20.12.	PEMERINTAH KECAMATAN SEKO						
	PENDAPATAN	Rp 1.120.000,00	Rp 1.120.000,00	Rp -	-		
	4	Rp 1.120.000,00	Rp 1.120.000,00	Rp -	-		
	5	Rp 1.107.712.000,00	Rp 1.107.712.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1.	Rp 857.712.000,00	Rp 857.712.000,00	Rp -	-		
	Belanja Tidak Langsung						
	00. 00. 6. 1. 1.	Rp 857.712.000,00	Rp 857.712.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 01.	Rp 588.828.000,00	Rp 588.828.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 02.	Rp 268.800.000,00	Rp 268.800.000,00	Rp -	-		
	00. 00. 5. 1. 1. 05.	Rp 89.000,00	Rp 89.000,00	Rp -	-		
	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 89.000,00	Rp 89.000,00	Rp -	-		

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH/ BERKURANG			
1	2	3	4	5			6
xx. xx. 5. 2	Belanja Langsung	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp			
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.105.992.000,00)	Rp (1.105.992.000,00)	Rp			
1. 20. 1.20.13.	PEMERINTAH KECAMATAN RAMPI						
	PENDAPATAN	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp			
	BELANJA	Rp 770.742.000,00	Rp 770.742.000,00	Rp			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 557.982.000,00	Rp 557.982.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 557.982.000,00	Rp 557.982.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 325.157.000,00	Rp 325.157.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 232.800.000,00	Rp 232.800.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp			
xx. xx. 5. 2	Belanja Langsung	Rp 212.760.000,00	Rp 212.760.000,00	Rp			
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (770.242.000,00)	Rp (770.242.000,00)	Rp			
1. 20. 1.20.14.	PEMERINTAH KECAMATAN MALANGKE						
	PENDAPATAN	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp			
	BELANJA	Rp 1.307.555.000,00	Rp 1.307.555.000,00	Rp			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.028.085.000,00	Rp 1.028.085.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 1.028.085.000,00	Rp 1.028.085.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 816.595.000,00	Rp 816.595.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 208.800.000,00	Rp 208.800.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 390.000,00	Rp 390.000,00	Rp			
xx. xx. 5. 2	Belanja Langsung	Rp 281.570.000,00	Rp 281.570.000,00	Rp			
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.289.855.000,00)	Rp (1.289.855.000,00)	Rp			
1. 20.15.	PEMERINTAH KECAMATAN MALANGKE BARAT						
	PENDAPATAN	Rp 9.889.000,00	Rp 9.889.000,00	Rp			
	BELANJA	Rp 1.157.817.000,00	Rp 1.157.817.000,00	Rp			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 894.577.000,00	Rp 894.577.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 894.577.000,00	Rp 894.577.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 730.983.000,00	Rp 730.983.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 163.200.000,00	Rp 163.200.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 494.000,00	Rp 494.000,00	Rp			
xx. xx. 5. 2	Belanja Langsung	Rp 263.140.000,00	Rp 263.140.000,00	Rp			
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.147.948.000,00)	Rp (1.147.948.000,00)	Rp			
1. 20. 1.20.16.	PEMERINTAH KECAMATAN MASAMBA						
	PENDAPATAN	Rp 154.740.000,00	Rp 154.740.000,00	Rp			
	BELANJA	Rp 2.845.913.000,00	Rp 2.845.913.000,00	Rp			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.532.593.000,00	Rp 2.532.593.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 2.532.593.000,00	Rp 2.532.593.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 2.293.358.000,00	Rp 2.293.358.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 231.600.000,00	Rp 231.600.000,00	Rp			
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 7.737.000,00	Rp 7.737.000,00	Rp			

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERRURANG			
1	2	3	4	5	5	5	
xx, xx, 5, 2	Belanja Langsung	Rp 313.220.000,00	Rp 313.220.000,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (2.691.173.000,00)	Rp (2.691.173.000,00)	Rp -	Rp -		
1. 20. 1.20.17.	PEMERINTAH KECAMATAN MAPPEDECENG						
	PENDAPATAN	Rp 23.700.000,00	Rp 23.700.000,00	Rp -	Rp -		
	BELANJA	Rp 1.294.917.000,00	Rp 1.294.917.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 994.917.000,00	Rp 994.917.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Pegawai	Rp 994.917.000,00	Rp 994.917.000,00	Rp -	Rp -		
	Gaji & Tunjangan	Rp 787.332.000,00	Rp 787.332.000,00	Rp -	Rp -		
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 206.400.000,00	Rp 206.400.000,00	Rp -	Rp -		
	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 1.185.000,00	Rp 1.185.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Langsung	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.271.217.000,00)	Rp (1.271.217.000,00)	Rp -	Rp -		
1. 20. 1.20.18.	PEMERINTAH KECAMATAN BONE-BONE						
	PENDAPATAN	Rp 108.145.000,00	Rp 108.145.000,00	Rp -	Rp -		
	BELANJA	Rp 1.753.222.000,00	Rp 1.753.222.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.485.002.000,00	Rp 1.485.002.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Pegawai	Rp 1.485.002.000,00	Rp 1.485.002.000,00	Rp -	Rp -		
	Gaji & Tunjangan	Rp 1.238.794.000,00	Rp 1.238.794.000,00	Rp -	Rp -		
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 220.800.000,00	Rp 220.800.000,00	Rp -	Rp -		
	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 5.408.000,00	Rp 5.408.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Langsung	Rp 288.220.000,00	Rp 288.220.000,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.645.077.000,00)	Rp (1.645.077.000,00)	Rp -	Rp -		
1. 20. 1.20.19.	PEMERINTAH KECAMATAN SUKAMAJU						
	PENDAPATAN	Rp 98.584.000,00	Rp 98.584.000,00	Rp -	Rp -		
	BELANJA	Rp 1.748.589.000,00	Rp 1.748.589.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.423.589.000,00	Rp 1.423.589.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Pegawai	Rp 1.423.589.000,00	Rp 1.423.589.000,00	Rp -	Rp -		
	Gaji & Tunjangan	Rp 1.173.139.000,00	Rp 1.173.139.000,00	Rp -	Rp -		
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 243.600.000,00	Rp 243.600.000,00	Rp -	Rp -		
	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 4.850.000,00	Rp 4.850.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Langsung	Rp 325.000.000,00	Rp 325.000.000,00	Rp -	Rp -		
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (1.651.605.000,00)	Rp (1.651.605.000,00)	Rp -	Rp -		
1. 20. 1.20.20.	PEMERINTAH KEURAHAN KAPPUNA						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
	BELANJA	Rp 189.480.000,00	Rp 189.480.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 112.800.000,00	Rp 112.800.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Pegawai	Rp 112.800.000,00	Rp 112.800.000,00	Rp -	Rp -		
	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 112.800.000,00	Rp 112.800.000,00	Rp -	Rp -		
	Belanja Langsung	Rp 76.680.000,00	Rp 76.680.000,00	Rp -	Rp -		




KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5		6	
		SUPPLUS / (DEFISIT)					
1. 20. 1.20.21.	PENDAPATAN	Rp (189.480.000,00)	Rp (189.480.000,00)	Rp			
	BELANJA	Rp 184.800.000,00	Rp 184.800.000,00	Rp			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp			
	Belanja Pegawai	Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp			
	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp			
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp			
	Belanja Langsung	Rp 76.800.000,00	Rp 76.800.000,00	Rp			
	SUPPLUS / (DEFISIT)		Rp (184.800.000,00)	Rp (184.800.000,00)	Rp		
1. 20. 1.20.22.	PEMERINTAH KELURAHAN KASIMBONG						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp			
	BELANJA	Rp 184.800.000,00	Rp 184.800.000,00	Rp			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 109.200.000,00	Rp 109.200.000,00	Rp			
	Belanja Pegawai	Rp 109.200.000,00	Rp 109.200.000,00	Rp			
	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp			
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 109.200.000,00	Rp 109.200.000,00	Rp			
	Belanja Langsung	Rp 75.600.000,00	Rp 75.600.000,00	Rp			
	SUPPLUS / (DEFISIT)		Rp (184.800.000,00)	Rp (184.800.000,00)	Rp		
1. 20. 1.20.23.	PEMERINTAH KELURAHAN BALUASE						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp			
	BELANJA	Rp 192.000.000,00	Rp 192.000.000,00	Rp			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 116.400.000,00	Rp 116.400.000,00	Rp			
	Belanja Pegawai	Rp 116.400.000,00	Rp 116.400.000,00	Rp			
	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp			
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 116.400.000,00	Rp 116.400.000,00	Rp			
	Belanja Langsung	Rp 75.600.000,00	Rp 75.600.000,00	Rp			
	SUPPLUS / (DEFISIT)		Rp (192.000.000,00)	Rp (192.000.000,00)	Rp		
1. 20. 1.20.24.	PEMERINTAH KELURAHAN MAROVO						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp			
	BELANJA	Rp 180.200.000,00	Rp 180.200.000,00	Rp			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 99.600.000,00	Rp 99.600.000,00	Rp			
	Belanja Pegawai	Rp 99.600.000,00	Rp 99.600.000,00	Rp			
	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp			
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 99.600.000,00	Rp 99.600.000,00	Rp			
	Belanja Langsung	Rp 80.600.000,00	Rp 80.600.000,00	Rp			
	SUPPLUS / (DEFISIT)		Rp (180.200.000,00)	Rp (180.200.000,00)	Rp		
1. 20. 1.20.25.	PEMERINTAH KELURAHAN SALASSA						


KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011					PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG			
				Rp.			
1	2	3	4	5	6		
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -			
	BELANJA	Rp 189.440.000,00	Rp 189.440.000,00	Rp -			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -			
	Belanja Pegawai	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -			
	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -			
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -			
	Belanja Langsung	Rp 85.040.000,00	Rp 85.040.000,00	Rp -			
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (189.440.000,00)	Rp (189.440.000,00)	Rp -			
1. 20. 1.20.26.	PEMERINTAH KELURAHAN BONE-BONE						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -			
	BELANJA	Rp 186.800.000,00	Rp 186.800.000,00	Rp -			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -			
	Belanja Pegawai	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -			
	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -			
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 104.400.000,00	Rp 104.400.000,00	Rp -			
	Belanja Langsung	Rp 82.400.000,00	Rp 82.400.000,00	Rp -			
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (186.800.000,00)	Rp (186.800.000,00)	Rp -			
1. 20. 1.20.27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -			
	BELANJA	Rp 1.354.765.000,00	Rp 1.354.765.000,00	Rp -			
	Belanja Tidak Langsung	Rp 516.600.000,00	Rp 516.600.000,00	Rp -			
	Belanja Pegawai	Rp 618.600.000,00	Rp 618.600.000,00	Rp -			
	Gaji & Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -			
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 516.600.000,00	Rp 516.600.000,00	Rp -			
	Belanja Langsung	Rp 838.165.000,00	Rp 838.165.000,00	Rp -			
	Program Lainnya	Rp 276.316.000,00	Rp 276.316.000,00	Rp -			
	Program Monitoring/evaluasi Penanganan Bencana Alam	Rp 661.850.000,00	Rp 661.850.000,00	Rp -			
	Menghentikan Penanggulangan Bencana Alam	Rp 661.850.000,00	Rp 661.850.000,00	Rp -			
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 661.850.000,00	Rp 661.850.000,00	Rp -			
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	Rp 41.500.000,00	Rp 41.500.000,00	Rp -			
	Belanja Abi Tulis Kantor	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp -			
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -			
	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp -			
	Belanja Bahan/terseksi	Rp 155.000.000,00	Rp 155.000.000,00	Rp -			
	Belanja Bahan Baku/Bangunan	Rp 85.000.000,00	Rp 85.000.000,00	Rp -			
	Belanja Bahan Obat-Obatan	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp -			
	Belanja Bahan Material Lainnya	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp -			
	Belanja Jasa Kantor	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -			
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -			

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH / BERKURANG Rp.	P E N J E L A S A N
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	5		
1	2	3	4	5	6	
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 10.250.000,00	Rp 10.250.000,00	Rp -	-	
5. 2. 2. 08. 01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp 10.250.000,00	Rp 10.250.000,00	Rp -	-	
5. 2. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minum	Rp 15.000.000,00	Rp 115.000.000,00	Rp 100.000.000,00	100.000.000,00	
5. 2. 2. 11. 01.	Belanja Makanan dan Minum Harian	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	100.000.000,00	
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makanan dan Minum Rapat	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -	-	
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 293.100.000,00	Rp 193.100.000,00	Rp (100.000.000,00)	-	
5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -	-	
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 253.100.000,00	Rp 153.100.000,00	Rp (100.000.000,00)	-	
5. 2. 2. 22.	Belanja Transportasi	Rp 27.000.000,00	Rp 27.000.000,00	Rp -	-	
5. 2. 2. 22. 01.	Belanja Transportasi	Rp 27.000.000,00	Rp 27.000.000,00	Rp -	-	
		Rp (1.354.785.000,00)	Rp (1.354.785.000,00)	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)					
4. 21. 1.21.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN					
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
4.		Rp -	Rp -	Rp -	-	
5.	BELANJA	Rp 8.348.987.000,00	Rp 8.348.987.000,00	Rp -	-	
00. 00. 6. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 7.222.342.000,00	Rp 7.222.342.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 7.222.342.000,00	Rp 7.222.342.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 6.184.342.000,00	Rp 6.184.342.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 1.038.000.000,00	Rp 1.038.000.000,00	Rp -	-	
xx. xx. 6. 2.	Belanja Langsung	Rp 2.128.645.000,00	Rp 2.128.645.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (8.348.987.000,00)	Rp (8.348.987.000,00)	Rp -	-	
1.22.01.	BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA					
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
4.		Rp -	Rp -	Rp -	-	
5.	BELANJA	Rp 3.788.192.000,00	Rp 3.788.192.000,00	Rp -	-	
00. 00. 6. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.717.911.000,00	Rp 1.717.911.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 1.717.911.000,00	Rp 1.717.911.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.332.711.000,00	Rp 1.332.711.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 385.200.000,00	Rp 385.200.000,00	Rp -	-	
xx. xx. 6. 2.	Belanja Langsung	Rp 2.068.281.000,00	Rp 2.068.281.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (3.788.192.000,00)	Rp (3.788.192.000,00)	Rp -	-	
4. 25. 1.25.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KERUDAYAAN DAN PARIMISATA					
	PENDAPATAN	Rp 220.000.000,00	Rp 220.000.000,00	Rp -	-	
4.		Rp 220.000.000,00	Rp 220.000.000,00	Rp -	-	
5.	BELANJA	Rp 4.077.018.000,00	Rp 4.077.018.000,00	Rp -	-	
00. 00. 6. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.002.989.000,00	Rp 2.002.989.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 2.002.989.000,00	Rp 2.002.989.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.518.169.000,00	Rp 1.518.169.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 475.800.000,00	Rp 475.800.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Rp -	-	

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKRP)	TAHUN ANGGARAN 2011			BERTAMBAH/ BERKURANG Rp.	PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	5		
1	2	3	4	5	6	
xx xx 5. 2	Belanja Langsung	Rp 2.074.050.000,00	Rp 2.074.050.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (3.857.018.000,00)	Rp (3.857.018.000,00)	Rp -	-	
1. 26. 1.26.01.	KANTOR PERUSTAKKAN DAN ARSIP DAERAH					
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
	BELANJA	Rp 1.684.356.000,00	Rp 1.684.356.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 563.406.000,00	Rp 563.406.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Belanja Pegawai	Rp 583.406.000,00	Rp 583.406.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 442.206.000,00	Rp 442.206.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 121.200.000,00	Rp 121.200.000,00	Rp -	-	
xx xx 5. 2	Belanja Langsung	Rp 1.120.950.000,00	Rp 1.120.950.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (1.684.356.000,00)	Rp (1.684.356.000,00)	Rp -	-	
2. 01. 2.01.01.	DINAS PERTANIAN					
	PENDAPATAN	Rp 130.000.000,00	Rp 130.000.000,00	Rp -	-	
	BELANJA	Rp 16.810.457.000,00	Rp 16.810.457.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.536.887.000,00	Rp 3.536.887.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 3.536.887.000,00	Rp 3.536.887.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 2.873.187.000,00	Rp 2.873.187.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 663.700.000,00	Rp 663.700.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemuliharaan Retribusi Daerah	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp -	-	
xx xx 5. 2	Belanja Langsung	Rp 12.073.570.000,00	Rp 12.073.570.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (15.480.457.000,00)	Rp (15.480.457.000,00)	Rp -	-	
2. 02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNGAN					
	PENDAPATAN	Rp 960.000.000,00	Rp 960.000.000,00	Rp -	-	
	BELANJA	Rp 8.288.716.000,00	Rp 8.288.716.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 3.671.368.000,00	Rp 3.671.368.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 3.671.368.000,00	Rp 3.671.368.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 3.065.868.000,00	Rp 3.065.868.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 558.000.000,00	Rp 558.000.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 05.	Biaya Insentif Pemuliharaan Retribusi Daerah	Rp 47.500.000,00	Rp 47.500.000,00	Rp -	-	
xx xx 5. 2	Belanja Langsung	Rp 4.617.350.000,00	Rp 4.617.350.000,00	Rp -	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (7.338.716.000,00)	Rp (7.338.716.000,00)	Rp -	-	
2. 03. 2.03.01.	DINAS PERTAMBAHANGAN DAN ENERGI					
	PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-	
	BELANJA	Rp 3.712.124.000,00	Rp 3.712.124.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.648.154.000,00	Rp 1.648.154.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp 1.648.154.000,00	Rp 1.648.154.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 01.	Gaji & Tunjangan	Rp 1.258.154.000,00	Rp 1.258.154.000,00	Rp -	-	
00. 00. 5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 390.000.000,00	Rp 390.000.000,00	Rp -	-	
xx xx 5. 2	Belanja Langsung	Rp 2.063.970.000,00	Rp 2.063.970.000,00	Rp -	-	

KODE REKENING	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TAHUN ANGGARAN 2011				PENJELASAN
		PERUBAHAN KESATU	PERUBAHAN KEDUA	BERTAMBAH / BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
2. 05. 2.05.01.	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (3.712.124.000,00)	Rp (3.712.124.000,00)	Rp	-	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	PENDAPATAN	Rp 13.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp	-	
	BELANJA	Rp 6.867.330.000,00	Rp 6.867.330.000,00	Rp	-	
	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.112.630.000,00	Rp 2.112.630.000,00	Rp	-	
	Belanja Pegawai	Rp 2.112.630.000,00	Rp 2.112.630.000,00	Rp	-	
	Gaji & Tunjangan	Rp 1.696.300.000,00	Rp 1.696.300.000,00	Rp	-	
	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 445.880.000,00	Rp 445.880.000,00	Rp	-	
	Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00	Rp	-	
	Belanja Langsung	Rp 4.744.700.000,00	Rp 4.744.700.000,00	Rp	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (6.844.330.000,00)	Rp (6.844.330.000,00)	Rp	-	
	SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	Rp	Rp	-	

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1. Sekretaris Daerah		
2. Asisten		
3. Kepala DPKD		
4. Kabid Anggaran		
5. Kasi Penyusunan APBD		

BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI